V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian lapangan, para petani peserta sosialisasi PLP2B yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul didapat 79 responden sebagai sampel dari penelitian ini. Dari 79 responden yang ada, karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 10. Lokasi Responden

Lokasi	Jumlah	Persentase (%)
Banguntapan	42	53.2
Dlingo	37	46.8
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 10 karakteristik lokasi responden, didapatkan bahwa responden yang berlokasi di Kecamatan Banguntapan sebanyak 42 orang (53,2%) dan responden yang berlokasi di Kecamatan Dlingo sebanyak 37 orang (46,8%) yang menandakan responden dari kedua daerah masih terbagi merata dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh jumlahnya. Perbedaan tersebut di dasari oleh jumlah kelompok tani di kecamatan banguntapan lebih banyak dibandingkan jumlah kelompok tani di dlingo walaupun menurut BPP di dua kecamatan tersebut tidak semua ketua kelompok tani menghadiri sosialisasi tersebut.

Tabel 11. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	79	100.0
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 11 karakteristik jenis kelamin responden, didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 79 orang (100%) dan tidak ada perempuan yang berarti semua petani adalah laki-laki yang hadir pada sosialisasi PLP2B tersebut. Hal ini wajar mengingat pertanian masih merupakan bidang yang

dilakukan oleh lelaki, dimana perempuan kebanyakan hanya membantu saat dibutuhkan, dan biasanya. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Rahmawati dan Abdulkadir-Sunito (2013) yang mengatakan Rumahtangga buruh tani pria memiliki curahan waktu kerja lebih besar dibanding curahan waktu kerja yang dimiliki rumahtangga petani wanita untuk profil aktivitas dalam satu hari.

Tabel 12. Usia Responden

Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 30 Tahun	2	2.5
30-40 Tahun	38	48.1
41-50 Tahun	30	38.0
50 Tahun keatas	9	11.4
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 12 karakteristik umur pada penelitian ini dibagi menjadi 4 kelompok umur kurang atau sama dengan 30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Mayoritas responden dengan usia 30-40 tahun sebesar 38 orang (48,1%), jumlah responden terkecil adalah responden dengan usia dibawah 30 tahun berjumlah 2 orang (2,5%). Usia mayoritas responden yang berkisar antara 30-50 tahun, menandakan bahwa mayoritas petani yang menjadi responden di daerah penelitian berada pada usia produktif secara ekonomi dimana petani cukup memiliki potensi untuk melakukan kegiatan usahataninya. Mantra (2014) menyatakan bahwa umur yang produktif secara ekonomi dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu kelompok umur 0-14 tahun adalah usia belum produktif, kelompok umur 15-64 tahun yaitu kelompok usia produktif, dan kelompok umur di atas 65 tahun yaitu kelompok usia yang sudah tidak lagi produktif. Usia produktif merupakan usia ideal untuk bekerja dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap informasi dan teknologi yang inovatif di bidang pertanian. Usia produktif

tersebut merupakan usia ideal untuk bekerja dengan baik dan masih kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam usahatani dan di luar usahatani.

Tabel 13. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SD	2	2.5
SMP	3	3.8
SMA/SMK	51	64.6
PT	23	29.1
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 13 karakteristik pendidikan didapatkan bahwa untuk mayoritas para petani peserta sosialisasi PLP2B yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo adalah orang yang cukup berpendidikan. Dengan pendidikan terakhir adalah SMA/SMK sebanyak 51 orang (64,6%), yang berarti telah memenuhi gerakan wajib belajar 9 tahun, dan diikuti lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 23 orang (29,1%). Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan petani. Petani yang memiliki jenjang pendidikan tinggi pada umumnya akan lebih cepat menguasai dan menerapkan teknologi yang diterima dibandingkan dengan petani yang berpendidikan rendah. Mayoritas tingkat pendidikan di daerah penelitian cukup baik sehingga pihak penyuluh tidak terlalu sulit dalam memberikan informasi dan penyuluhan mengenai sosialisasi PLP2B.

Tabel 14. Pengalaman Bertani Responden

Pengalaman Bertani	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 10 Tahun	40	50.6
11-25 Tahun	31	39.2
26-40 Tahun	7	8.9
40 Tahun keatas	1	1.3
Total	79	100.0

Berdasarkan table 14 karakteristik pengalaman bertani responden didapatkan bahwa untuk mayoritas responden memiliki lama pengalaman bertani 10 tahun kebawah sebanyak 40 orang (50,6%), Ini menunjukkan bahwa mayoritas para

petani peserta sosialisasi PLP2B yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo adalah petani dengan pengalaman dibawah 25 tahun, karena sebagian besar kelompok tani menunjuk seseorang untuk menjadi ketua kelompok tani berdasarkan keaktifan dia di kelompok tani tersebut maupun aktif dalam menghadiri sosialisasi serta memiliki usia yang masih tergolong produktif walaupun memiliki pengalaman bertani yang belum terbilang cukup lama.

Tabel 15. Luas Sawah yang dimiliki Responden

Luas Sawah	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 3000 m^2	56	70.9
3000-8999 m^2	22	27.8
9000 m^2 keatas	1	1.3
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 15 karakteristik luas tanah sawah yang dimiliki responden didapatkan bahwa untuk luas tanah sawah yang dimiliki maryoritas responden dibawah 3000 m^2 sebanyak 56 orang (70,9%). Hanya sebanyak 1 orang (1,3%) yang memiliki luas tanah sawah yang dimiliki responden 9000m^2 keatas Ini menunjukkan bahwa mayoritas para petani peserta sosialisasi PLP2B yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo, memiliki lahan pertanian dibawah 3000 m^2. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar para petani mendapatkan lahan tersebut dari warisan walaupun ada sebagian kecil petani yang mendapatkan lahan tersebut dari hasil jual beli mengingat harga tanah yang semakin kesini semakin tinggi harga tanah.

Tabel 16. Pendapatan Responden dari Pertanian

Pendapatan Pertanian	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 1 Juta	18	22.8
1-3 Juta	44	55.7
3 Juta keatas	15	19.0
Tidak Menjawab	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 16 karakteristik pendapatan responden dari pertanian didapatkan bahwa pendapatan responden dari pertanian 1-3 juta sebanyak 44 orang (55,7%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas para petani peserta sosialisasi PLP2B yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo, memiliki pendapatan responden dari pertanian 1-3 juta perbulan sebanyak 44 orang (55,7%). Pendapatan yang cukup besar dibandingkan UMR pegawai DI. Yogyakarta pada umumnya, dimana untuk Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlinggo mengikuti UMR Kabupaten Bantul sebesar Rp. 1,404.000.

Tabel 17. Pendapatan Responden dari Non Pertanian

Pendapatan Non Pertanian	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 1 Juta	8	10.1
1-3 Juta	45	57.0
3 Juta keatas	14	17.7
Tidak Menjawab	12	15.2
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 17 karakteristik pendapatan responden dari non pertanian didapatkan bahwa pendapatan responden dari non pertanian mayoritas berjumlah 1-3 juta sebanyak 45 orang (57%). Untuk data Tidak menjawab sebanyak 12 orang (15,2%) menandakan responden tidak menjawab. Ini menunjukkan bahwa mayoritas para petani peserta sosialisasi PLP2B yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo, memiliki pendapatan responden dari non pertanian 1-3 juta perbulan sebanyak 45 orang (57%). Pendapatan yang cukup besar dibandingkan UMR pegawai DI. Yogyakarta pada umumnya, dimana untuk Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlinggo mengikuti UMR Kabupaten Bantul sebesar Rp. 1,404.000. Apalagi jika ditambahkan dengan pendapatan dari bertani.

Tabel 18. Nilai Perkiraan Harga Sawah milik Responden

Pendapatan Pertanian	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 500 Ribu/m^2	28	35.4
500 Ribu-1 Juta/m^2	28	35.4
1 Juta/m^2 keatas	22	27.8
Tidak Menjawab	1	1.3
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 18 karakteristik nilai perkiraan harga sawah milik responden didapatkan bahwa nilai perkiraan harga sawah milik mayoritas responden bernilai dibawah 500 ribu/m^2 hingga 1 juta/m^2 (70,8%). Hal tersebut wajar karena rata-rata letak sawah milik petani berada bukan di daerah kota atau pertokoan melainkan letaknya lebih mendekati di daerah permukiman bahkan ada juga yang terletak di daerah hamparan sawah yang luas dan sulit di jangkau oleh kendaraan roda empat.

B. Sikap Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul dilihat melalui 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan). Dari hasil penelitian dilapangan, penilaian (skoring) akan 3 komponen sikap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sikap Petani pada Aspek Kognitif (Pengetahuan) terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Sikap kognitif merupakan kecenderungan pengetahuan petani tentang Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penilaian petani atas aspek ini adalah :

Tabel 19. Sikap Petani pada Aspek Kognitif (Pengetahuan) Terhadap Kebijakan PLP2B

No.	Pernyataan	Skor	Sikap Petani
1.	Pengetahuan petani terhadap maksud dari Kebijakan PLP2B.	3.06	Tahu
2.	Pengetahuan petani terhadap tujuan dari Kebijakan PLP2B.	3.05	Tahu
3.	Pengetahuan petani terhadap Penetapan Kebijakan PLP2B.	2.87	Tahu
4.	Pengetahuan petani bahwa PLP2B dilaksanakan pada kurun waktu yang lama.	2.56	Tahu
5.	Pengetahuan petani terhadap konsekuensi dari kebijakan PLP2B.	2.38	Kurang Tahu
6.	Pengetahuan petani terhadap Kompensasi dari Kebijakan PLP2B.	2.32	Kurang Tahu
	Total	16.24	Tahu

Dari Tabel 19 terlihat pengetahuan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih baik (16,24). Dari enam atribut terlihat ada empat variabel yang memiliki cukup pengetahuan (Tahu), dan dua yang kurang memiliki pengetahuan (kurang tahu), sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih cukup baik.

a. Sikap Kognitif (Penilaian pengetahuan petani terhadaap kebijakan (PLP2B)

Tabel 20. Pengetahuan Petani terhadap Maksud dari Kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tahu	74	94.9
Sangat Tahu	5	5.1
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 20 penilaian responden akan maksud dari kebijakan PLP2B adalah tahu sebanyak 74 orang (93,7%), sangat tahu sebanyak 5 orang (6,3%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden tahu akan maksud dari kebijakan PLP2B mengingat kebijakan ini sudah di sosialisasikan pada tahun 2017 yang diikuti oleh setiap responden pada penelitian ini.

Tabel 21. Pengetahuan petani terhadap Tujuan dari Kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tahu	75	94.9
Sangat Tahu	4	5.1
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 21 penilaian responden akan tujuan dari kebijakan PLP2B adalah tahu sebanyak 75 orang (94,9%), sangat tahu sebanyak 4 orang (5,1%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden tahu akan tujuan dari kebijakan PLP2B karena pada sosialisasi tersebut pemerintah sudah menjelaskan tujuan di buatnya kebijakan tersebut kepada para peserta sosialisasi PLP2B yang diharapkan para petani bisa menyetujui akan diadakannya kebijakan PLP2B.

Tabel 22. Pengetahuan petani terhadap Penetapan Kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tahu	1	1.3
Kurang Tahu	8	10.1
Tahu	70	88.6
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 22 penilaian responden akan penetapan kebijakan PLP2B adalah Tahu sebanyak 70 orang (88,6%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden tahu akan penetapan kebijakan PLP2B karena pada sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kabupaten bantul telah di jelaskan bahwa penetapan PLP2B itu berdasarkan perda tata ruang yang sudah di susun untuk pembagian lahan di seluruh kabupaten bantul berdasarkan fungsi dan kegunaannya.

Tabel 23. Pengetahuan petani bahwa PLP2B dilaksanakan pada kurun waktu yang lama

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tahu	6	7.6
Kurang Tahu	23	29.1
Tahu	50	63.3
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 23 penilaian responden akan mengetahui bahwa kebijakan PLP2B dilaksanakan pada kurun waktu yang lama adalah adalah Tahu sebanyak 50 orang (63,3%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden mengetahui bahwa kebijakan PLP2B dilaksanakan pada kurun waktu yang lama karena sudah dijelaskan pada sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kabupaten bantul bahwa kebijakan PLP2B ini memakai system kontrak yang berjangka waktu cukup lama dan setelah kontrak itu habis maka akan ada tindakan selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman.

Tabel 24. Pengetahuan petani terhadap konsekuensi dari kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tahu	15	19
Kurang Tahu	19	24.1
Tahu	45	57.0
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 24 penilaian responden akan mengetahui konsekuensi dari kebijakan PLP2B adalah Tahu sebanyak 45 orang (57%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden mengetahui konsekuensi dari kebijakan PLP2B walaupun ada juga yang kurang mengetahui bahkan tidak tahu akan konsekuensi dari PLP2B karena mayoritas yang mengetahui konsekuensi dari kebijkanan PLP2B ini mereka mendapatkannya dengan cara mencari sumber lain selain dari sosialisasi dan juga ada yang sekedar tahu melalui perbincangan dengan ketua kelompok lain.

Tabel 25. Pengetahuan petani terhadap Kompensasi dari Kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tahu	19	24.1
Kurang Tahu	16	20.3
Tahu	44	55.7
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 25 penilaian responden akan mengetahui kompensasi dari kebijakan PLP2B adalah Tahu sebanyak 44 orang (55,7%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden mengetahui kompensasi dari kebijakan PLP2B walaupun ada juga yang kurang mengetahui dan bahkan tidak tahu akan kompensasi dari kebijakan PLP2B karena mayoritas petani yang mengetahui kompensasi dari kebijakan PLP2B ini mendapatkan informasi melalui media lain selain dari sosialisasi dan juga ada pula yang mengetahui kompensasi tersebut dari sekedar berbincang dengan ketua kelompok tani lain.

2. Sikap Petani pada Aspek Afektif (Perasaan) terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Sikap afektif merupakan perasaan petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penilaian petani atas aspek ini adalah :

Tabel 26. Sikap Petani pada Aspek Afektif (Perasaan) Terhadap Kebijakan PLP2B

No.	Pernyataan	Skor	Sikap Petani
1.	Kesetujuan petani dengan adanya Kebijakan PLP2B.	3.05	Setuju
2.	Kesetujuan petani bahwa kebijakan PLP2B adalah tindakan yang benar dan wajar.	3.04	Setuju
3.	Kesetujuan petani bahwa kebijakan PLP2B dapat mempertahankan kemandirian pangan nasional.	3.03	Setuju
4.	Kesetujuan petani bahwa kebijakan PLP2B Menguntungkan Petani.	2.70	Setuju
5.	Kesiapan petani terhadap Konsekuensi apabila Lahannya terkena kebijakan PLP2B.	2.44	Kurang Setuju
6.	Kesediaan petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan untuk jangka waktu yang lama.	2.03	Kurang Setuju
7.	Kesetujuan petani dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah.	1.92	Kurang Setuju

No.	Pernyataan	Skor	Sikap Petani
8.	Kesetujuan petani terhadap kesesuaian kompensasi yang diberikan.	1.84	Kurang Setuju
9.	Kesetujuan petani terhadap kompensasi yang diberikan dapat memperbaiki kesejahteraan petani	1.77	Kurang Setuju
	Total	21.82	Kurang Setuju

Dari Tabel 26 terlihat perasaan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (21,82). Dari sembilan atribut terlihat ada empat variabel yang memiliki cukup persetujuan (setuju), dan lima yang kurang memiliki kesetujuan (kurang setuju), sehingga dapat dikatakan bahwa perasaan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (kurang setuju).

a. Sikap Afektif (Rasa suka atau tidak suka terhadap kebijakan PLP2B)

Tabel 27. Kesetujuan petani dengan adanya Kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Kurang Setuju	1	1.3
Setuju	73	92.4
Sangat Setuju	5	6.3
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 27 penilaian responden akan setuju dengan adanya kebijakan PLP2B adalah Setuju sebanyak 73 orang (92,4%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden setuju dengan adanya kebijakan PLP2B karena bagi sebagian petani beranggapan untuk sementara ini berprofesi menjadi petani itu adalah pekerjaan pokok untuk menafkahi keluarga mereka dan jika lahan yang mereka punya dialihfungsikan terutama oleh pengembang maka para petani akan tidak mempunyai pekerjaan lagi.

Tabel 28. Kesetujuan petani bahwa kebijakan PLP2B adalah tindakan yang benar dan wajar

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Setuju	76	96.2
Sangat Setuju	3	3.8
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 28 penilaian responden akan Kebijakan PLP2B adalah tindakan yang benar dan wajar adalah Setuju sebanyak 76 orang atau (96,2%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa setuju bahwa kebijakan PLP2B adalah tindakan yang benar dan wajar mayorutas dari mereka sadar bahwa walaupun kita harus mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi indosenia harus tetap mempertahankan lahan hijau terutama pertanian pangan mengingat beras merupakan kebutuhan pokok untuk sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tabel 29. Kesetujuan petani bahwa kebijakan PLP2B dapat mempertahankan kemandirian pangan nasional

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Setuju	77	97.5
Sangat Setuju	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 29 penilaian responden akan kebijakan PLP2B dapat mempertahankan kemandirian pangan nasional adalah Setuju sebanyak 77 orang (97,5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa kebijakan PLP2B dapat mempertahankan kemandirian pangan nasional karena dengan adanya kebijakan PLP2B ini lahan mereka tidak akan beralih fungsi menjadi non pertanian yang dapat mengurangi produktivitas padi dan berdampak kurangnya stok pangan secara nasional.

Tabel 30. Kesetujuan petani bahwa kebijakan PLP2B Menguntungkan Petani

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Kurang Setuju	24	30.4
Setuju	55	69.6
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 30 penilaian responden akan Kebijakan PLP2B menguntungkan petani adalah Setuju sebanyak 55 orang (69,6%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa Kebijakan PLP2B menguntungkan petani karena sebagian besar petani merasa dilindungi dengan adanya kebijakan PLP2B ini dari pengembang di daerah tertentu walaupun ada juga yang kurang setuju karena mereka beranggapan nilai jual tanah semakin tinggi apabila tanah tersebut dapat dialih fungsikan menjadi non pertanian dan juga ada pula yang beranggapan bahwa tidak selamanya bertanam padi sawah itu selalu menguntungkan.

Tabel 31. Kesiapan petani terhadap Konsekuensi apabila Lahannya terkena kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Setuju	7	8.9
Kurang Setuju	30	38.0
Setuju	42	53.2
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 31 penilaian responden akan kesiapan menerima segala konsekuensi apabila lahannya terkena kebijakan PLP2B setuju sebanyak 42 orang (53,2%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa siap menerima segala konsekuensi apabila lahan saya terkena kebijakan tersebut walaupun ada yang mengatakan kurang setuju dan bahkan tidak setuju karena menurut mereka jika lahan tersebut berada di daerah dekat perkotaan yang bisa dijadikan sebagai usaha lain selain pertanian, mereka akan mengalih fungsikan lahan tersebut.

Tabel 32. Kesediaan petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan untuk jangka waktu yang lama

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Setuju	7	8.9
Kurang Setuju	63	79.7
Setuju	9	11.4
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 32 penilaian responden akan saya bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan untuk jangka waktu yang lama adalah Kurang setuju sebanyak 63 orang (79,7%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa kurang bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan untuk jangka waktu yang lama dikarenakan menurut kebanyakan responden akan ada banyak kebutuhan di waktu mendatang yang mengharuskan mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

Tabel 33. Kesetujuan petani dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Setuju	10	12.7
Kurang Setuju	65	82.3
Setuju	4	5.1
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 33 penilaian responden akan saya setuju dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah..adalah Kurang setuju sebanyak 65 orang (82,3%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa Kurang setuju dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah karena mayoritas dari mereka beranggapan bahwa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah biasanya tidak sebanding dengan apa yang mereka inginkan mengingat bahwa kebijakan tersebut melarang mereka mengalih fungsikan lahan mereka dan bahkan melarang mereka untuk bercocok tanam selain padi.

Tabel 34. Kesetujuan petani terhadap kesesuaian kompensasi yang diberikan

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Setuju	17	21.5
Kurang Setuju	58	73.4
Setuju	4	5.1
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 34 penilaian responden akan kompensasi yang diberikan sudah sesuai adalah kurang setuju sebanyak 58 orang (73,4%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa Kurang setuju kompensasi yang diberikan sudah sesuai karena secara umum mereka menganggap kompensasi dari kebijakan PLP2B ini bias lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan petani kalau pemerintah mengikut sertakan aspirasi mereka atau pemerintah bisa memberikan pilihan opsi kompensasi kepada petani yang selanjutnya mereka bisa memilih sendiri kompensasi apa yang di butuhkan bagi mereka.

Tabel 35. Kesetujuan petani terhadap kompensasi yang diberikan dapat memperbaiki kesejahteraan petani

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Setuju	10	12.7
Kurang Setuju	65	82.3
Setuju	4	5.1
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 35 penilaian responden akan kesetujuan dengan kompensasi yang diberikan dapat memperbaiki kesejahteraan petani.adalah kurang setuju sebanyak 65 orang (82,3%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa kurang setuju dengan kompensasi yang diberikan dapat memperbaiki kesejahteraan petani karena mereka beranggapan secara umum kompensasi yang diberikan kepada petani belum bisa menyesuaikan kebutuhan mereka dan menurut mereka kompensasi yang diberikan masih belum dapat menggantikan konsekuensi yang mereka dapatkan jika lahan mereka terkena kebijakan PLP2B.

3. Sikap Petani pada Aspek Konatif (Tindakan) terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Sikap konatif merupakan kecenderungan petani melakukan suatu tindakan terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penilaian petani atas aspek ini adalah :

Tabel 36. Sikap Petani pada Aspek Konatif (Tindakan) Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Pernyataan	Skor	Sikap Petani
1.	Kecenderungan petani mempertahankan lahan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.	3.05	Tertarik
2.	Kecenderungan petani untuk menjual lahan dan membeli lahan di tempat selain PLP2B.	2.64	Tertarik
3.	Kecenderungan petani mencari tahu informasi lebih lanjut terkait PLP2B.	2.53	Tertarik
4.	Kecenderungan petani mencari informasi tentang keuntungan lahan yang terkena kebijakan PLP2B.	2.21	Kurang Tertarik
5.	Kecenderungan petani mempengaruhi petani lain untuk bersedia dalam mendukung kebijakan PLP2B.	1.90	Kurang Tertarik
	Total	12.33	Kurang Tertarik

Dari Tabel 36 terlihat tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (12,33). Dari lima atribut terlihat ada tiga variabel yang memiliki cukup ketertarikan (Tertarik), dan dua yang kurang memiliki ketertarikan (kurang tertarik), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih kurang baik.

a. **Sikap Konatif (Kecenderungan melakukan tindakan terhadap kebijakan PLP2B)**

Tabel 37. Kecenderungan petani mempertahankan lahan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Kurang Tertarik	2	2.5
Tertarik	69	87.3
Sangat Tertarik	6	7.6
Tidak Menjawab	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 37 penilaian responden akan Saya bersedia mempertahankan lahan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah tertarik sebanyak 69 orang (87,3%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa tertarik dengan bersedia mempertahankan lahan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional karena bagi mereka selain bertani itu menjadi pekerjaan pokok, ketahanan pangan juga penting untuk di pertahankan mengingat negara indonesia adalah negara yang agraris.

Tabel 38. Kecenderungan petani untuk menjual lahan dan membeli lahan di tempat selain PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tertarik	7	8.9
Kurang Tertarik	14	17.7
Tertarik	56	70.9
Tidak Menjawab	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 38 penilaian responden akan saya tertarik untuk menjual lahan dan membeli lahan di tempat selain PLP2B adalah tertarik sebanyak 56 orang (70,9%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa tertarik untuk menjual lahan dan membeli lahan di tempat selain PLP2B karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa jika mereka menjual lahannya setelah lahan mereka terkena kebijakan PLP2B harga tanah mereka akan menjadi turun selain itu

mereka juga beranggapan khususnya bagi yang memiliki petak lahan yang lebih dari satu salah satu dari lahan mereka harus ada yang bias di jual belikan secara normal untuk kebutuhan lain.

Tabel 39. Kecenderungan petani mencari tahu informasi lebih lanjut terkait PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tertarik	3	3.8
Kurang Tertarik	30	38.0
Tertarik	44	55.7
Tidak Menjawab	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 39 penilaian responden akan saya selalu mencari tahu informasi terkait PLP2B adalah tertarik sebanyak 44 orang (55,7%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa tertarik mencari tahu informasi terkait PLP2B walaupun ada pula yang kurang tertarik bahkan tidak tertarik untuk mencari tahu informasi terkait PLP2B. Hal ini dikarenakan sebagian petani merasa bimbang dengan adanya kebijakan PLP2B ini, walaupun akan ada kompensasi yang diberikan akan tetapi mereka juga tidak dapat mengalih fungsikan lahan mereka untuk di tanami komoditas lain atau bahkan tidak bisa di alih fungsikan untuk sektor non pertanian.

Tabel 40. Kecenderungan petani mencari informasi tentang keuntungan lahan yang terkena kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tertarik	6	7.6
Kurang Tertarik	50	63.3
Tertarik	20	25.3
Sangat Tertarik	1	1.3
Tidak Menjawab	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 40 penilaian responden akan saya mencari tahu informasi tentang keuntungan lahan yang terkena kebijakan PLP2B adalah kurang tertarik sebanyak 50 orang (63,3%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas

responden merasa kurang tertarik mencari tahu informasi tentang keuntungan lahan yang terkena kebijakan PLP2B. Hal ini dikarenakan sebagian petani hanya mengikuti perintah atau informasi yang diberikan oleh pemerintah sebab mereka mempunyai pekerjaan lain yang harus difikirkan selain berusaha tani.

Tabel 41. Kecenderungan petani mempengaruhi petani lain untuk bersedia dalam mendukung kebijakan PLP2B

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tertarik	19	24.1
Kurang Tertarik	47	59.5
Tertarik	11	13.9
Tidak Menjawab	2	2.5
Total	79	100.0

Berdasarkan tabel 41 penilaian responden akan saya akan ikut mempengaruhi petani lain untuk bersedia dalam mendukung kebijakan PLP2B adalah kurang tertarik sebanyak 47 orang (59,5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas responden merasa kurang tertarik dengan ikut mempengaruhi petani lain untuk bersedia dalam mendukung kebijakan PLP2B karena mereka beranggapan tugas tersebut merupakan tugas pemerintah dan mereka hanya mengikuti instruksi dari pemerintah saja dan menyampaikan instruksi pemerintah tersebut kepada anggota kelompok.

3. Total Sikap Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul dilihat melalui 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan). Secara keseluruhan dapat dinilai sebagai berikut :

Tabel 42. Sikap Petani Terhadap Kebijakan PLP2B

No.	Pernyataan	Skor	Sikap Petani
1.	Aspek Kognitif (Pengetahuan)	16.24	Tahu
2.	Aspek Afektif (Perasaan)	21.82	Kurang Setuju
3.	Aspek Konatif (Tindakan)	12.33	Kurang Tertarik
	Total	50.39	Baik

Dari Tabel 42 terlihat sikap para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik (50,39). Dari 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik.

C. Hubungan antara Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, maka dilakukan perhitungan korelasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel x (faktor-faktor yang mempengaruhi sikap) dan variabel y (sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Didapat sebagai berikut :

Tabel 43. Korelasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Sikap Petani terhadap Kebijakan PLP2B

Faktor-Faktor	Rs	Keterangan
Asal	0,713	Sangat kuat
Jenis Kelamin	0,196	Sangat Rendah
Usia	-0,099	Sangat Rendah
Pendidikan	-0,077	Sangat Rendah
Pengalaman Bertani	-0,331	Rendah
Luas Tanah	-0,487	Sedang
Pendapatan Pertanian	-0,548	Sedang
Pendapatan non Pertanian	-0,419	Sedang
Harga Sawah	-0,588	Sedang

Asal. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara asal lokasi responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif yaitu (Rs = 0,713). Hal ini berarti terdapat kecenderungan dimana petani yang berasal daerah yang jauh dari perkotaan akan lebih menerima kebijakan PLP2B karena mengingat kecamatan dlingo memiliki tingkat alihfungsi lahan terendah di kabupaten Bantul sehingga petani yang berada di daerah jauh dari perkotaan terutama kecamatan dlingo belum memikirkan untuk mengalih fungsikan lahannya menjadi sektor non pertanian. Hal ini berbeda dengan petani yang berada di kecamatan Banguntapan mengingat kecamatan tersebut memiliki tingkat alihfungsi lahan tertinggi di kabupaten Bantul yang dikarenakan banyaknya pengembang yang mengincar tanah di daerah tersebut maka mayoritas petani di daerah tersebut juga akan memilih untuk mengalih fungsikan lahannya karena harga yang di tawarkan pengembang untuk membeli tanah mereka cenderung tinggi.

Jenis Kelamin. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara jenis kelamin responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sangat lemah dan bersifat positif yaitu (rs = 0,196). Hal ini berarti jika jenis kelamin mempengaruhi sikap petani terhadap kebijakan PLP2B maka

tanda positif memiliki arti petani yang berjenis kelamin laki-laki akan memiliki sifat yang lebih baik terhadap penetapan kebijakan PLP2B. hal ini dikarenakan pola fikir laki-laki akan lebih terbuka karena pada dasarnya laki-laki lebih memakai fikirannya ketimbang perasaannya dibandingkan perempuan.

Usia. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara usia responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan sangat rendah dan bersifat negatif yaitu (Sig = -0,099). Hal ini berarti jika usia petani mempengaruhi sikap petani terhadap kebijakan PLP2B maka tanda negatif memiliki arti semakin tinggi usia petani maka akan semakin buruk sikap petani tersebut terhadap kebijakan PLP2B. hal ini disebabkan rata-rata semakin tinggi usia petani maka petani tersebut akan semakin memikirkan lahnnya untuk kebutuhan lain selain untuk pertanian karena kebanyakan petani saat di lakukannya penelitian menyatakan bahwa mereka tidak selamanya menggeluti dunia pertanian karena hasil dari bertani kurang konsisten untuk kebutuhan hidup mereka dan mereka juga menyatakan bahwa tanah yang mereka miliki sebagian ath seluruhnya akan di wariskan ke anak untuk di bangun menjadi tempat tinggal.

Pendidikan. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat pendidikan responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sangat rendah dan bersifat negatif yaitu (Sig = -0,077). Hal ini dapat diartikan jika pendidikan petani mempengaruhi sikap petani terhadap PLP2B maka semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka akan semakin negatif siakp petani tersebut terhadap kebijakan PLP2B karena prtani yang memiliki pendidikan rendah akan cenderung lebih mengikuti saja perintah yang diberikan oleh pemerintah berbeda dengan yang memiliki pendidikan lebih tinggi karena

pemikiran mereka akan cenderung lebih memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan PLP2B dan memikirkan dampak yang mereka terima dari kebijakan tersebut.

Pengalaman Bertani. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara lama pengalaman bertani responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang rendah dan bersifat negatif yaitu (rs = -0,331). Hal ini berarti terdapat kecenderungan dimana semakin lama pengalaman bertani petani maka sikap petani terhadap kebijakan PLP2B akan semakin buruk (negatif) dikarenakan jika petani memiliki pengalaman bertani lebih lama maka petani akan lebih memikirkan akan susah senang nya bertani tanaman pangan dan petani tersebut lebih memikirkan untuk bertani komoditas lain atau bahkan untuk petnani yang lahannya berada di tempat yang strategis akan berfikiran untuk mengalih fungsikan lahan tersebut untuk sector non pertanian.

Luas Tanah. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara luas tanah persawahan yang dimiliki responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif yaitu (Rs = -0,487). Hal ini berarti terdapat kecenderungan dimana semakin luas tanah persawahan yang dimiliki petani maka sikap petani terhadap kebijakan PLP2B akan semakin buruk (negatif) karena bagi petani yang memiliki lahan yang luas akan berfikiran untuk mengalih fungsikan lahannya untuk sector non pertanian dan bahkan akan menjual sebagian lahan mereka untuk keperluan mereka kedepannya.

Pendapatan dibidang Pertanian. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan petani dari bidang pertanian responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sedang dan

bersifat negatif yaitu (rs = -0,548). Hal ini berarti terdapat kecenderungan dimana semakin tinggi pendapatan petani dari bidang pertanian maka sikap petani terhadap kebijakan PLP2B akan semakin buruk (negatif) karena bagi petani yang memiliki pendapatan besar dari sektor pertanian, mereka akan cenderung memiliki modal untuk selanjutnya akan menggunakan lahannya tersebut untuk berusaha lain selain bertani.

Pendapatan dibidang non Pertanian. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara lama pengalaman bertani responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang rendah dan bersifat negatif yaitu (rs = -0,419). Hal ini berarti terdapat kecenderungan dimana semakin tinggi pendapatan petani dari bidang non pertanian maka sikap petani terhadap kebijakan PLP2B akan semakin buruk (negatif) karena menurut hasil observasi para petani yang memiliki pendapatan besar di sector non pertanian otomatis mereka akan lebih memilih berusaha lain selain bertani yang lebih bisa mensejahterakan perekonomian mereka.

Harga Sawah. Berdasarkan Tabel 43, menunjukkan bahwa korelasi antara harga sawah responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif yaitu (rs = -0,588). Hal ini berarti terdapat kecenderungan dimana semakin tinggi harga sawah petani maka sikap petani terhadap kebijakan PLP2B akan semakin buruk (negatif) karena berdasarkan observasi yang sudah dilakukan mayoritas petani lebih memilih untuk menjual lahannya jika lahan tersebut sudah tinggi dan akan dialokasikan untuk berusaha yang lain selain bertani dan juga untuk menambah modal agar usaha mereka yang berada di sektor non pertanian lebih besar lagi.

D. Pembahasan

Sikap petani terhadap implementasi PLP2B sangat penting diketahui karena selain kebijakan tersebut akan sukses tergantung dari para petani yang mengalami dampaknya dan juga masyarakat atau petani yang terkena PLP2B, lahan mereka tidak dapat dialihfungsikan ke non pertanian pangan, namun lahannya dapat dijual dengan tetap status lahannya adalah lahan pertanian pangan. Sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul dilihat melalui 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan).

Dari komponen sikap kognitif (pengetahuan), pengetahuan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih baik (16,24). Dari enam atribut terlihat ada empat variabel yang memiliki cukup pengetahuan (Tahu), dan dua yang kurang memiliki pengetahuan (kurang tahu), sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih cukup baik.

Dari komponen sikap afektif (tanggapan), terlihat perasaan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (21,82). Dari sembilan atribut terlihat ada empat variabel yang memiliki cukup persetujuan (setuju), dan lima yang kurang memiliki kesetujuan (kurang setuju), sehingga dapat dikatakan bahwa perasaan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul

terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (kurang setuju).

Dari komponen sikap konatif (tindakan), terlihat tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (12,33). Dari lima atribut terlihat ada tiga variabel yang memiliki cukup ketertarikan (Tertarik), dan dua yang kurang memiliki ketertarikan (kurang tertarik), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih kurang baik.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, sikap para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik (50,39). Dari 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik.

Dilihat bahwa nilai korelasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan sikap petani terhadap kebijakan PLP2B adalah asal petani, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, lama pengalaman, luas tanah persawahan yang dimiliki petani, pendapatan petani baik dari bidang pertanian maupun non pertanian, dan harga sawah yang berdasarkan interval nilai koefisien korelasi menandakan adanya

korelasi yang beragam. Asal lokasi responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif, sedangkan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat rendah dan bersifat positif pula, selanjutnya untuk Usia dan Pendidikan memiliki hubungan yang sangat rendah akan tetapi memiliki sifat yang negatif, sedangkan luas tanah persawahan yang dimiliki petani, pendapatan petani baik dari bidang pertanian maupun di bidang non pertanian dan harga sawah memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif, dan yang terakhir lama pengalaman beritani memiliki hubungan yang rendah dan bersifat negatif.

Hal ini sejalan dengan penelitian tentang tanggapan petani atas kebijakan PLP2B dilaksanakan oleh Rantini dan Prabatmodjo (2014) di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian Rantini dan Prabatmodjo (2014) menyatakan bahwa 68,6% dari responden penelitiannya menyatakan tidak akan pernah mengalihfungsikan lahan sawah yang mereka miliki, meskipun dengan adanya sistem tumpang sari yang memungkinkan 52,4 % responden dapat menanam komoditas lain selain padi di lahan tersebut. Pandangan responden menunjukkan kesediaan mereka untuk memeliharanya, karena mereka berkehendak untuk memelihara jaringan irigasi, meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, dan memelihara jalan usahatani. Responden berpendapat bahwa 80% responden membutuhkan atas insentif terhadap PLP2B (walaupun belum ada ketetapan insentif di lokasi penelitian). Hanya 54,3% dari responden enyatakan memerlukan insentif atas petani berprestasi. Sebanyak 64,8% menolak diberlakukannya sanksi pidana terhadap petani yang melakukan alih fungsi lahan karena sawah sepenuhnya merupakan hak petani pemilik lahan.